

Jawa Barat Tertinggi Dalam Kasus Trafficking

JATINANGOR, (GM).-
Provinsi Jawa Barat saat ini menjadi salah satu daerah tertinggi dalam kasus *human trafficking* (perdagangan manusia, **red**) dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Jurusan Humas Fikom Unpad, Dr. Suwandi Sumartias, M.Si. pada kegiatan Dies Natalis Fikom Unpad ke-52 di Ruang Moestopo, kampus Unpad Jatinangor, Kab. Sumedang, Selasa (18/9).

Menurut Suwandi, besarnya kasus tersebut akibat kurangnya pemahaman masyarakat, dan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat.

Di sisi lain, lanjut Suwandi, peran media informasi bisa dimanfaatkan sebagai bentuk penyampaian informasi kepada publik. Hal itu dapat dilakukan melalui peran media massa, lembaga pendidikan, dan pemerintah.

"Ini tantangan bagi ilmu komunikasi di Indonesia, bagaimana mengatasi *human trafficking* melalui pemberdayaan perempuan. Termasuk pemerintah dan sejumlah pihak yang peduli. Komunikasi dapat dilakukan dengan membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui peran ilmu komunikasi," kata Suwandi.

Ia menyatakan, *human trafficking* dapat dicegah dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Langkah yang dilakukan bisa berupa mediasi, advokasi, dan mendirikan forum-forum diskusi, termasuk mengajak

pemerintah untuk memberantas perdagangan manusia di Indonesia.

"Undang-undang sudah ada, tetapi belum efektif. Contohnya masih banyak ditemukan kasus-kasus perdagangan manusia. Seperti penyaluran tenaga kerja ke luar negeri yang berkedok TKI/TKW. Namun, ternyata di dalamnya justru perdagangan manusia," jelasnya.

Lebih rentan

Di sisi lain, lanjut Suwandi, perdagangan manusia lebih rentan terjadi kepada anak-anak dan perempuan. Karenanya, diperlukan sosialisasi kepada anak-anak, perempuan, dan orang-orang di sekitarnya untuk waspada terhadap kasus *human trafficking* tersebut.

"Kaum perempuan yang bekerja pada sektor formal dan informal, merupakan fenomena sosial yang semakin menarik diperbincangkan. Di sana muncul isu-isu yang dihadapkan pada perempuan seperti gender, ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, termasuk di dalamnya fenomena perdagangan manusia yang menimpa anak-anak dan perempuan," ujarnya.

Terkait tingginya kasus perdagangan manusia di Jabar, ia sangat berharap semua pihak tidak berpangku tangan dan segera mengantisipasi.

"Untuk memerangi kasus perdagangan manusia ini, tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Semua pihak mulai dari masyarakat, ormas, LSM, dan mahasiswa harus bergerak dan mengantisipasi dengan sejumlah langkah," harapnya. **(B.46)****